



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LECKY FREDERICH KOLI, STP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

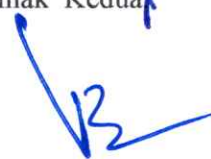
Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

16 November 2022

Pihak Kedua  


 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Pihak Pertama, ✓  


**LECKY FREDERICH KOLI, STP**

†

**LAMPIRAN:**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL		TARGET		FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	2021	2022	
1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB (%)	12,27	13,45			
2	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (Poin)	95,9	104			
3	Meningkatnya keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	67,9	69			

**B. Pelaksanaan Anggaran**

NO	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (program)	Rp. 61.678.051.849,-	Realisasi minimal 90%
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 1.293.652.300,-	Realisasi minimal 90%

2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 36.701.694.149,-	Realisasi minimal 85%
3.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 17.358.941.660,-	Realisasi minimal 90%
4.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 3.964.540.240,-	Realisasi minimal 90%
5.	Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.116.651.000,-	Realisasi minimal 90%
6.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 242.572.500,-	Realisasi minimal 90%
b)	<b>Pendapatan</b>	<b>3.872.244.000,-</b>	<b>Realisasi minimal 70%</b>
	<b>Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)</b>	<b>Rp. 65.550.295.849,-</b>	
2)	<b>APBN</b>		
	<b>Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)</b>		
1.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (DK Satker Tanaman Pangan)	Rp. 3.387.655.000,-	Realisasi minimal 90%
2.	Dukungan Manajemen (DK Satker Tanaman Pangan)	Rp. 106.260.000,-	Realisasi minimal 90%
3.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Satker Tanaman Pangan)	Rp. 5.050.430.000,-	Realisasi minimal 90%
4.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP Satker Tanaman Pangan)	Rp. 19.446.350.000,-	Realisasi minimal 90%
5.	Dukungan Manajemen (TP Satker Tanaman Pangan)	Rp. 1.351.449.000,-	Realisasi minimal 90%
6.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Satker Hortikultura)	Rp. 1.626.312.000,-	Realisasi minimal 90%
7.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP Satker Hortikultura)	Rp. 3.420.000.000,-	Realisasi minimal 90%
8.	Dukungan Manajemen (TP Satker Hortikultura)	Rp. 200.000.000,-	Realisasi minimal 90%
9.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (DK Satker Hortikultura)	Rp. 227.552.000,-	Realisasi minimal 90%
10.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (DK Satker Hortikultura)	Rp. 6.442.868.000,-	Realisasi minimal 90%

11.	Dukungan Manajemen (DK Satker Hortikultura)	Rp. 1.294.000.000,-	Realisasi minimal 90%
12.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (DK Satker Perkebunan)	Rp. 221.700.000,-	Realisasi minimal 90%
13.	Dukungan Manajemen (DK Satker Perkebunan)	Rp. 806.300.000,-	Realisasi minimal 90%
14.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Satker Perkebunan)	Rp. 3.195.370.000,-	Realisasi minimal 90%
15.	Dukungan Manajemen (TP Satker Perkebunan)	Rp. 601.303.000,-	Realisasi minimal 90%
16.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp. 31.607.691.000,-	Realisasi minimal 90%
17.	Dukungan Manajemen (TP Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp. 1.864.000.000,-	Realisasi minimal 90%
18.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (DK Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp. 1.323.021.000,-	Realisasi minimal 90%
19.	Dukungan Manajemen (DK Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp. 339.920.000,-	Realisasi minimal 90%
20.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 14.438.884.000,-	Realisasi minimal 90%
21.	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan (TP Pusat Ketahanan Pangan)	Rp. 715.000.000,-	Realisasi minimal 90%
22.	Pemantapan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (TP Pusat Ketahanan Pangan)	Rp. 230.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	<b>Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan</b>	<b>Rp. 97.896.065.000,-</b>	<b>Realisasi minimal 90%</b>

C. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100%, kecuali terdapat kendala teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ/LPPD, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2022;

- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);
- F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (> 80 -90);
- G. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;
- H. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:
  - 1. TL temuan di bawah tahun 2020; Administrasi 100 %, Non Administrasi minimal 75 %;
  - 2. TL temuan di atas tahun 2020; Administrasi/Non Administrasi 90-100 %;
- I. Predikat/status sertifikat Manajemen ISO 9001: 2015;
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) jenis;
- K. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi e-NADI paling lambat ;Tanggal 1 Maret 2022;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal 75;
- N. Jumlah PKS dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

16 NOVEMBER 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LECKY FREDERICH KOLI, STP